

Strategi Pemerintah dalam Mitigasi Banjir Kecamatan Dayeuhkolot

David Natanael Sitorus, Nia Karniawati

Universitas Komputer Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 6 Mei 2024

Accepted : 10 Juni 2024

Available Online : 27 Juni 2024

KEYWORDS

Flooding, Sedimentation, Development, Regulation, Communication

CORRESPONDENSI

Nama : Nia Karniati

Email : nia.karniawati@email.unikom.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

Flooding is a disaster that is commonly accepted to occur in Dayeuhkolot due to the frequent floods in that area. The floods are caused by the rapid metropolitan development of the basin in the city of Bandung. This change is evident from the increase in building density and the expansion of impermeable areas, the disposal of various types of waste into rivers causing significant sedimentation in the Citarum River, and the exploitation of groundwater, leading to a yearly decline in land surface. The presence of Bandung Regency Regional Regulation No. 02 of 2013 as an effort in disaster management is expected to be a solution to the flood problems in Bandung Regency. However, since the regulation was enacted 6 years ago, floods still frequently occur to this day. This situation arises due to poor communication between the community and policymakers, as well as inadequate resources for the implementation of the regulation. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The researcher employs a qualitative descriptive approach, focusing on the problems and understanding them by gathering information from sources. Based on the discussion results, the implementation of the Flood Disaster Mitigation Policy by BPBD Dayeuhkolot Village, Bandung Regency has not been maximized, and there are still problems and obstacles faced in its execution. This is indicated by issues found in Flood Disaster Prevention, Flood Disaster Emergency Response, and Flood Disaster Rehabilitation and Reconstruction.

Pendahuluan

Secara sederhana, banjir adalah saat air mencakup ke suatu luas wilayah sehingga menutupi permukaan tanah, seperti yang terjadi di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Dayeuhkolot terletak di daerah yang sering dilalui sungai. Wilayah ini termasuk salah satu daerah di Cekungan Bandung, Jawa Barat, yang rentan terhadap bahaya banjir. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Citarum sebagai sumber banjir dan pengaruh pengelolaan pembangunan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Akibat dari semakin kuatnya pengaruh faktor-faktor tersebut dari tahun ke tahun, penduduk yang tinggal di sekitar sungai Citarum tidak bisa menghindari bencana banjir. Hingga saat ini, bencana banjir setiap tahun selalu terjadi di wilayah daerah aliran sungai Citarum, terutama di kecamatan Dayeuhkolot (Muhammad, 2019). Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir di suatu wilayah adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Chandler (1962) dalam (Nurhayati, 2015) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Joko (2011) dalam (Arofah & Puspaningtyas., 2023), mitigasi bencana adalah serangkaian

upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan dan program mitigasi yang efektif, serta memastikan implementasi dan pengawasan yang baik. Dalam hal ini pemerintah mendirikan lembaga untuk mengelola penanggulangan bencana, yang mencakup berbagai langkah seperti menetapkan kebijakan untuk pembangunan yang berpotensi memicu bencana, kegiatan pencegahan bencana, respons cepat dalam situasi darurat, dan proses rehabilitasi (Harijoko et al., 2021). Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui Badan Penanggulangan Bencana baik yang berada di Pusat, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut BPBD (Dianty, 2022).

BPBD Kabupaten Bandung dibentuk atas dasar bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Bandung rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana tersebut disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Danil, 2021). Rangkaian bencana yang dialami kabupaten Bandung, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana (Rahman, 2015).

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan kebencanaan tersebut adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pra bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan, sedangkan tanggap darurat dilakukan dengan melaksanakan evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan penampungan, dan kegiatan pasca bencana dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan adanya Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung ([Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung, 2013](#)). Perda ini sebagai langkah konkrit pemerintah daerah dalam regulasi kebijakan penanggulangan bencana. Perda ini diharapkan menjadi solusi dalam penanggulangan bencana yang mungkin terjadi. Salah satu bencana yang menjadi perhatian peneliti dalam penanggulangannya adalah mengenai implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir yang setiap tahun terjadi. Bencana banjir di daerah Kabupaten Bandung yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Citarum, terjadi di daerah Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Majalaya, Cicalengka dan Rancaekek, banjir terjadi akibat meluapnya air di beberapa sungai yang melintasi daerah tersebut, yaitu Sungai Cibodas, Cisangkuy, yang terjadi berulang kali, yaitu tahun 1931, 1964, 1992, hingga sekarang ([Permana, 2023](#)). Wilayah bencana banjir yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Desa Dayeuhkolot kecamatan Dayeuhkolot. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang paling sering terkena banjir di wilayah kabupaten Bandung.

Desa Dayeuhkolot merupakan kawasan di kabupaten Bandung yang berada di sisi sungai Citarum. Berdasarkan sejarah, Dayeuhkolot yang dalam bahasa Sunda berarti kota tua, merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan kabupaten Bandung. Lokasinya sangat strategis, yaitu terletak di pertemuan sungai Cikapundung dengan sungai Citarum sebagai muaranya karena pada saat itu sungai menjadi jalur transportasi utama. Pada zaman kolonial Belanda, ibu kota harus dipindahkan 10 kilometer ke arah utara atau ke lokasi kota Bandung sekarang karena pada saat itu sedang dibangun jalan raya Post atau jalan raya Anyer-Panarukan yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa untuk memfasilitasi konektivitas antarkota di Pulau Jawa.. Selain itu, banjir yang sering melanda Dayeuhkolot menjadi alasan utama ibu kota kabupaten harus dipindahkan. Kota madya diubah statusnya menjadi kota Bandung dan memiliki sistem pemerintahan baru. Oleh karena itu, kabupaten Bandung harus mencari ibu kota baru sebagai pusat pemerintahannya. Dayeuhkolot tidak dipilih kembali menjadi ibukota kabupaten dengan alasan sering mengalami banjir maka, ibu kota kabupaten Bandung dipindahkan ke kecamatan Soreang. Meskipun demikian, Dayeuhkolot mengalami pembangunan yang pesat. Hal tersebut dikarenakan Dayeuhkolot merupakan sasaran ekspansi metropolitan Bandung sekaligus pintu gerbang ke wilayah Bandung Selatan. Dayeuhkolot memiliki dominasi fungsi permukiman dan perdagangan. Tidak hanya itu, Dayeuhkolot juga menjadi sasaran beberapa industri besar dan menarik masyarakat

untuk bekerja dan menetap di sana. Dengan begitu Dayeuhkolot menjadi salah satu pusat kegiatan dan memiliki peranan penting bagi kabupaten Bandung (Suhardja, 2022).

Banjir merupakan bencana yang dianggap lumrah terjadi di Dayeuhkolot hal ini karena seringnya terjadi banjir di daerah tersebut. Hal tersebut tentu saja menyebabkan kerugian yang besar, diantaranya membuat aktivitas masyarakat terganggu, kerusakan bangunan, munculnya wabah penyakit, terhambatnya kegiatan ekonomi, dan terganggunya konektivitas antara kota Bandung dengan wilayah Bandung Selatan. Banjir disebabkan perkembangan metropolitan cekungan Bandung sangat pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin memadatnya bangunan dan meningkatkan area kedap air, pembuangan berbagai jenis limbah ke sungai yang mengakibatkan sedimentasi yang besar di sungai Citarum dan eksploitasi air tanah sehingga terjadi penurunan muka tanah dari tahun ke tahun (Awal, 2016). Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 02 Tahun 2013 sebagai upaya dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemecahan masalah banjir di Kabupaten Bandung (Sirapati, 2015). Namun demikian sejak Perda tersebut dilahirkan 6 Tahun lalu, bencana banjir masih kerap terjadi hingga kini. Hal mendasar dalam menyoroti permasalahan dalam Mitigasi bencana banjir desa Dayeuhkolot membutuhkan perhatian banyak pihak sebab permasalahan banjir menjadi pertanggung jawaban publik, oleh sebab itu pentingnya komunikasi sebagai bagian penghubung antara masyarakat dengan pemangku kebijakan, sehingga permasalahan yang ada akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik (Warsono., 2020).

Birokrasi dapat memberikan jaminan lebih besar untuk tercapainya kebijakan dalam penyelesaian masalah mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. Pemberian izin bagi pembangunan yang akan memberikan dampak pada masyarakat luas seharusnya melalui proses dengar pendapat publik (Mulyawati, 2021). Tak hanya dari pemerintah dan pihak terkait, dibutuhkan sumber daya yang berkompeten agar kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan dapat meminimalisir dari, dampak akibat bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. Pada akhirnya dengan keasadaran dari semua pihak, upaya Mitigasi bencana banjir di desa Dayeuhkolot diharapkan dapat teratasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di desa Dayeuhkolot kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung telah diterapkan.

Metode

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, meliputi deskripsi dan analisis data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data berdasarkan kondisi nyata atau apa yang diungkapkan menurut sumber yang dianggap dapat dipercaya oleh peneliti dan disusun secara sistematis (Sugiyono, 2016).

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan hasil analisis dengan memusatkan perhatian pada permasalahan, dan dapat dipahami dengan menggali informasi dari narasumber (Sugiyono, 2012). Sumber data didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat setempat, observasi dan dokumentasi Lokasi penelitian di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung Jawa Barat

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi

Strategi adalah rencana terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi yang kompleks. Hal ini melibatkan pengidentifikasian sasaran, mengevaluasi sumber daya yang tersedia, dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi membantu organisasi atau individu mengelola sumber daya mereka secara efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif atau tujuan yang ditetapkan. Menurut Siagian (2004), strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Pemerintah telah melakukan beberapa strategi dalam penanggulangan banjir yakni:

1. Peningkatan Infrastruktur Drainase Lokal.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah meningkatkan infrastruktur drainase di Kecamatan Dayeuhkolot, yang mencakup pembersihan, perbaikan, dan perluasan saluran drainase yang sudah ada serta pembangunan saluran baru untuk mengalirkan air hujan secara efektif untuk mengurangi risiko banjir.

2. Pembangunan Taman-taman Hujan.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah membangun taman-taman hujan di Kecamatan Dayeuhkolot. Taman hujan berfungsi untuk menyerap air hujan, mencegah genangan air, dan mengurangi aliran air ke sungai secara tiba-tiba.

3. Pemantauan Cuaca dan Sistem Peringatan Dini.

Pemerintah Kabupaten Bandung meningkatkan pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini di Kecamatan Dayeuhkolot. Dengan adanya sistem ini, mereka dapat memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat jika ada potensi banjir, memungkinkan waktu yang lebih memadai untuk evakuasi dan persiapan.

4. Kontrol Tata Ruang dan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengendalikan tata ruang dan pembangunan secara lebih ketat di Kecamatan Dayeuhkolot. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu aliran air dan memperburuk risiko banjir.

5. Pengaturan Penggunaan Lahan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengatur penggunaan lahan secara bijaksana di Kecamatan Dayeuhkolot, termasuk menghentikan pembangunan di daerah resapan air atau area rawan banjir.

2. Mitigasi Bencana

Mitigasi struktural di Dayeuhkolot adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bencana alam, terutama bencana banjir di wilayah Dayeuhkolot yakni:

1. Pembangunan Tanggul dan Bendungan.

Pembangunan tanggul dan bendungan dapat membantu mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko banjir di daerah tersebut. Tanggul yang kuat dan terawat dengan baik dapat membantu mencegah luapan air ke daerah yang lebih rendah.

2. Peningkatan Kapasitas Sungai

Perlu dilakukan pemeliharaan dan perluasan sungai, serta pelebaran sungai, untuk memungkinkan aliran air yang lebih baik dan untuk mencegah banjir.

3. Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana alih-alih memperkuat struktur fisik. Dayeuhkolot, sebagai daerah yang rentan terhadap bencana, mengimplementasikan beberapa strategi mitigasi non-struktural, yakni:

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.

Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara bertindak dan merespon dalam situasi darurat serta kampanye kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik aman dan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri terhadap bencana alam.

2. Pengaturan Zonasi

Mengatur zonasi wilayah yang spesifik berdasarkan risiko bencana, sehingga pembangunan dan aktivitas dapat diatur sesuai dengan risiko yang ada.

Simpulan

Pemerintah selalau berusaha untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot dan guna untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut pemerintah telah menerapkan beberapa strategi mitigasi bencana banjir, seperti Peningkatan Infrastruktur Drainase Lokal, Pembangunan Taman-taman Hujan, Pemantauan Cuaca dan Sistem Peringatan Dini, Kontrol Tata Ruang dan Pembangunan Berkelanjutan, Pengaturan Penggunaan Lahan, Pembangunan Tanggul dan Bendungan, Peningkatan Kapasitas Sungai. Dengan demikian diharapkan strategi yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Dayeuhkolot dapat mengatasi banjir yang sering terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot.

Pemerintah Daerah maupun Kota Bandung harus selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot dan juga perlunya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan terus peduli terhadap wilayahnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Arofah, Z., & Puspaningtyas., A. (2023). Optimalisasi Pelayanan Mitigasi Bencana Banjir di Karangbinangun Lamongan Agar Masyarakat Peduli Akan Pentingnya Lingkungan. *Public Sphere Review*, 88–100.
- Awal, S. A. (2016). Identifikasi Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pengendalian Ruang di Kawasan Sempadan Sungai Citarum Wilayah Pengembangan Baleendah Kabupaten Bandung. *Prosiding Perencanaan Wilayah Dan Kota*.
- Danil, M. (2021). Manajemen Bencana. *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA 1*, 7–14.
- Dianty, J. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 10(4).
- Harijoko, A., Puspitasari, D., Prabaningrum, I., Prastika, K. P., & Wijayanti, N. F. (2021). *Manajemen penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia*. UGM PRESS.
- Muhammad, F. I. (2019). *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Studi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung*. UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Mulyawati, C. (2021). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 21(1).
- Nurhayati, S. (2015). Analisis Stategis Sistem Teknologi Informasi Dengan Pendekatan

- Analisis Swot (Studi Kasus: Divisi It Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung). *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(5).
- Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, (2013).
- Permana, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165.
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica*, 1(1), 1–14.
- Sirapati, F. I. (2015). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.". *Jurnal, Samarinda: Universitas Mulawarman*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardja, G. (2022). *The Future of Ideas: Wisata DAS Cikapundung*. Kanisius.
- Warsono., H. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.